

Judul : Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran (BANGGAR) DPR : Kasus desa fiktif jangan disepelekan
Tanggal : Rabu, 13 November 2019
Surat Kabar : Republika
Halaman : 8

SAID ABDULLAH, KETUA BADAN ANGGARAN (BANGGAR) DPR RI

Kasus Desa Fiktif Jangan Disepelekan

**Kemendagri tengah mengir-
minkan petugas untuk menyeli-
diki desa fiktif, bagaimana tang-
gapan dari DPR?**

Saya mengapresiasi langkah ke-
menterian-kementerian yang segera
melakukan koordinasi dengan Keme-
nterian Dalam Negeri, Kementerian
Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi, serta kepolisian
untuk menelusuri desa siluman dan
jumlah dana desa yang sudah mengalir
ke desa-desa.

Sebab, dana desa ini berasal uang
pajak rakyat yang disetor ke APBN,
yang tujuannya untuk meningkatkan
kualitas hidup di desa. mengentas-

kan kemiskinan, memajukan pereko-
nomian desa dan mengatasi kesen-
jangan pembangunan antardesa.

**Apa penyebab dana desa dapat
tersalurkan ke desa-desa fiktif?**

Menurut saya, kurangnya peng-
awasan, baik di tingkat pusat hingga
desa menjadi salah satu penyebabnya.
Masyarakat juga belum aktif ikut
mengawasi proses dana desa ini.

Munculnya desa fiktif terkait pe-
nyaluran dana desa tidak boleh di-
anggap sebelah mata sehingga persoal-
an ini harus dituntaskan. Sebab, ang-
garan untuk dana desa ini selalu me-
ningkat setiap tahunnya.

**Apa yang harus dilakukan
agar hal ini tidak kembali terjadi?**

Perkuat pengawasan yang dila-
kukan aparat pemerintahan di atasnya.
Mulai dari kecamatan, kabupaten, pro-
vinsi, hingga pusat untuk meminimal-
kan penyelewengan.

Database pengelolaan dana desa
juga perlu diperkuat agar pemerintah
dapat mengawasi penggunaannya.
Masyarakat juga diajak untuk meng-
awasi dana yang seharusnya diguna-
kan untuk mengembangkan desanya.

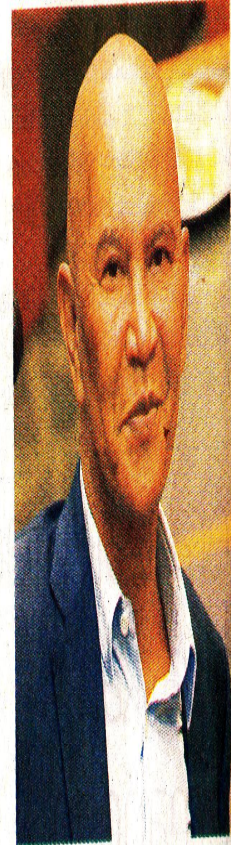
Perlu juga memberikan *reward*
dan *punishment* dari pemerintah ter-
hadap pengelolaan dana desa dalam

bentuk dana insentif desa.

**Bagaimana agar penggunaan
dana desa dapat tepat sasaran?**

Harus ada regulasi yang memper-
jelas fungsi dan kewenangan desa yang
pada tujuannya melahirkan kebijakan
penataan dan pengaturan mengenai
desa. DPR juga lebih proaktif dalam
mengawasi penggunaan dana desa
agar dapat mengantisipasi penyele-
wengan dana desa lebih dini, karena
persetujuan alokasi dana kan dila-
kukan oleh DPR bersama pemerintah.

Munculnya desa fiktif ini harus
menjadi kesempatan semua pihak agar
memperbaiki manajemen pengelolaan



dana desa supaya tepat sasaran. Ini
semua penting agar uang pajak benar-
benar dialokasikan untuk meningkat-
kan kesejahteraan rakyat di perdesaan.

■ nawir arsyad akbar
ed: fitriyati zamzami